

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 28-30 Desember 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Sabtu, 28 Desember 2019	Dua Proyek SPAM Mundur	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memastikan jadwal penyelesaian dua proyek SPAM mundur dari target seiring dengan kasus hukum pada porsi proyek yang diayai anggaran negara.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Sabtu, 28 Desember 2019	Total 144 PSN Ditarget Rampung 2020	KPPIP melansir sebanyak 92 proyek strategis nasional telah rampung dalam kurun waktu 2016-2019. Tahun depan, sebanyak proyek diharapkan bisa selesai sehingga secara kumulatif total PSN yang rampung mencapai 144 proyek.
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 11)	Sabtu, 28 Desember 2019	Sumse Pacu Wisata Andalan	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera memacu potensi industri pariwisata seiring dengan kehadiran Tol Palembang-Lampung yang merupakan bagian dari tol Trans-Sumatra.
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 12)	Sabtu, 28 Desember 2019	Jateng Kebut Lahan Baru 5.700 Ha	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memacu pengembangan tiga kawasan industri baru pada 2020 yang berlokasi di Brebes, Kebumen dan Rembang dengan total luasan 5.705,73 ha.
5	Media Indonesia (Halaman, 12)	Sabtu, 28 Desember 2019	Swasta Asing Diserukan Ikut Biayai Proyek Strategis	Pemerintah terus mendorong keikutsertaan swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah menargetkan 42% pembiayaan infrastruktur didapat dari keikutsertaan swasta.
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Senin, 30 Desember 2019	Ibu Kota Belum Masuk PSN	Proyek IKN belum diusulkan menjadi PSN kendati Kementerian PUPR sudah merencanakan proses konstruksi pada tahun depan.
7	Kompas (Halaman, 10)	Senin, 30 Desember 2019	Konsep Kota Hijau Cerdas Belum Matang	Konsep kota hijau cerdas dalam pembangunan ibu kota belum disiapkan secara matang. Padahal, persiapan sejak dini dapat memitigasi dampak pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik.
8	Kompas (Halaman, Jendela)	Senin, 30 Desember 2019	Konsep Ibu Kota Baru Belum Matang	Konsep kota hijau cerdas dalam pembangunan ibu kota belum cukup matang. Mitigasi risiko kerusakan lingkungan akibat pembangkit listrik tenaga uap dari batubara sangat penting agar kota tetap ramah lingkungan.
9	Media Indonesia (Halaman, 12)	Senin, 30 Desember 2019	Swasta belum Minati KPBU Perumahan	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengungkapkan, hingga saat ini belum ada swasta yang menyampaikan ketertarikannya untuk turut serta dalam program pembangunan perumahan dengan skema KPBU.

Judul	Dua Proyek SPAM Mundur	Tanggal	Sabtu, 28 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memastikan jadwal penyelesaian dua proyek SPAM mundur dari target seiring dengan kasus hukum pada porsi proyek yang diayai anggaran negara.		

► JERATAN KASUS HUKUM

Dua Proyek SPAM Mundur

Bisnis, JAKARTA — Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memastikan jadwal penyelesaian dua proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) mundur dari target seiring dengan kasus hukum pada porsi proyek yang dibiayai anggaran negara.

Ketua KPPIP Wahyu Utomo mengatakan dua proyek SPAM yang mengalami pemunduran jadwal penyelesaian adalah SPAM Umbulan dan SPAM Bandar Lampung. Kedua proyek itu bergulir lewat kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Semula, SPAM Umbulan rampung tahun ini, kemudian mundur menjadi Maret 2020.

Wahyu menyebut, pada kedua proyek tersebut, pekerjaan konstruksi porsi APBN terhambat karena kasus hukum yang melibatkan empat pejabat Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR).

Empat pejabat tersebut dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2018 karena diduga mengatur lelang pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2019 di Umbulan, Lampung, Toba, Katulampa, dan Donggala.

“Untuk [bagian] KPBU sendiri tidak bermasalah. Yang bermasalah ini yang di luar [porsi APBN] sehingga mau tidak mau secara

sistem ini menghambat,” tuturnya di Jakarta, Jumat (27/12).

Untuk diketahui, dua proyek SPAM tersebut memang mendapat dukungan konstruksi dari pemerintah melalui Kementerian PUPR.

Secara umum, progres konstruksi yang menjadi porsi badan usaha pelaksana PT Meta Adhya Tirta Umbulan telah mencapai 95%. Menurut Wahyu, sisa pekerjaan masih terkendala perizinan pemasangan pipa di beberapa lokasi di Surabaya. Walhasil, target penyelesaian mundur semula Desember 2019 menjadi Maret 2020.

Sebagaimana diketahui, proyek SPAM Umbulan merupakan proyek KPBU yang menelan investasi Rp2,05 triliun.

Sementara itu, penyelesaian pembangunan SPAM Bandar Lampung dijadwalkan juga molor. Wahyu menyebut, progres konstruksi yang dikerjakan badan usaha pelaksana PT Adhya Tirta Lampung telah mencapai 90%. Namun, jadwal penyelesaian bakal molor karena terdapat pekerjaan paket APBN yang terkena kasus KPK. Paket tersebut baru bisa dikerjakan pada Januari 2020 sehingga proyek SPAM dengan kapasitas produksi 750 liter per detik itu baru bisa dinikmati pada Agustus 2020. *(Rivki Maulana)*

Judul	Total 144 PSN Ditarget Rampung 2020	Tanggal	Sabtu, 28 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	KPPIP melansir sebanyak 92 proyek strategis nasional telah rampung dalam kurun waktu 2016-2019. Tahun depan, sebanyak proyek diharapkan bisa selesai sehingga secara kumulatif total PSN yang rampung mencapai 144 proyek.		

► PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Total 144 PSN Ditarget Rampung 2020

Bisnis, JAKARTA — Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melansir sebanyak 92 proyek strategis nasional telah rampung dalam kurun waktu 2016—2019. Tahun depan, sebanyak proyek diharapkan bisa selesai sehingga secara kumulatif total PSN yang rampung mencapai 144 proyek.

Ketua KPPIP Wahyu Utomo mengatakan pada 2019, jumlah PSN yang tuntas mencapai 30 proyek. Jumlah tersebut terdiri dari 9 proyek jalan, 4 proyek bendungan, 4 proyek bandara, dan 6 kawasan. Selanjutnya 2 proyek kereta, 1 proyek pelabuhan, 2 proyek smelter, dan 2 proyek teknologi.

Wahyu menuturkan, nilai investasi untuk 30 proyek tersebut mencapai Rp165,3 triliun. Sementara itu, nilai investasi untuk 92 proyek yang tuntas dalam empat tahun terakhir mencapai Rp467,4 triliun.

“Dari proyek-proyek yang sudah selesai itu, kami sedang buat kajian dampaknya secara detail. Sekarang *kan* belum ada angkanya, tahun depan

kami akan rilis [kajiannya],” jelas Wahyu di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Secara umum, ada 223 proyek infrastruktur yang masuk dalam daftar PSN sesuai dengan Peraturan Presiden No.56 Tahun 2018. Selain proyek infrastruktur, ada juga 3 program yang masuk dalam daftar PSN,201 yaitu program ketenagalistrikan, program pemerataan ekonomi, dan program industri pesawat.

Wahyu menjelaskan, pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah menciptakan tonggak baru di beberapa bidang. Dia menggambarkan, pembangunan jalan tol baru dalam periode 2015-2019 mencapai 1.233 kilometer, lebih panjang dari pencapaian 1978-2014 sejauh 821 kilometer.

Selain itu, penyelesaian 15 bendungan hingga 2019 juga telah menambah potensi air baku sebanyak 1,1 miliar meter kubik, menambah pasokan sumber irigasi untuk 120.000 hektare lahan, dan sumber energi listrik berdaya 113 megawatt.

Pada 2020, KPPIP menargetkan sebanyak 52 PSN bisa selesai sehingga secara kumulatif jumlah PSN yang rampung mencapai 144 proyek. Nilai investasi 144 proyek tersebut mencapai Rp801,4 triliun.

Wahyu optimistis tahun depan penyelesaian proyek bisa sesuai jadwal. Pasalnya, sebanyak 95 persen PSN sudah masuk dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi.

Dia menambahkan, hanya 14 proyek atau 5 persen dari total PSN yang masih dalam tahap penyiapan.

Sementara itu, Wahyu menyatakan telah menerima pengajuan status proyek strategis nasional (PSN) untuk 82 proyek. Jalan dan jembatan menjadi rencana pembangunan yang paling banyak diusulkan menjadi PSN.

Dia mengatakan usulan datang dari beragam kalangan, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga badan usaha. Dia menyebut, KPPIP akan melakukan evaluasi terhadap usulan pengajuan PSN tersebut.

(Rivki Maulana)

Judul	Sumse Pacu Wisata Andalan	Tanggal	Sabtu, 28 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 11)		
Resume	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera memacu potensi industri pariwisata seiring dengan kehadiran Tol Palembang-Lampung yang merupakan bagian dari tol Trans-Sumatra.		

► POTENSI EKONOMI DAERAH

Sumsel Pacu Wisata Andalan

Bisnis, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera memacu potensi industri pariwisata seiring dengan kehadiran Tol Palembang – Lampung yang merupakan bagian dari tol Trans-Sumatra.

Dinda Wulandari
dinda.wulandari@bisnis.com

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan kehadiran ruas tol tersebut memang memberi dampak positif terhadap konektivitas antar provinsi di Sumatera. Namun demikian, jalan bebas hambatan tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi Sumsel.

"Ini tantangan, di satu sisi kita dapat manfaat dari konektivitas Lampung—Sumsel jadi sangat dekat, tetapi ada dampak lain di sektor pariwisata, ini yang harus kita siasati," katanya saat acara Kaleidoskop Sumsel 2019, Kamis (26/12) petang.

Berdasarkan data PT Waskita Sriwijaya Tol sebagai pengelola ruas Tol Palembang – Kayuagung, jumlah kendaraan yang keluar dari Palembang menuju Lampung tercatat mencapai 5.000 – 6.000 kendaraan per hari. Ribuan kendaraan tersebut melintas sejak tol tersebut sejak beroperasi fungsional pada 20 Desember 2019.

Sebagian besar masyarakat Sumsel melewati tol tersebut untuk berlibur ke Lampung yang memiliki banyak objek wisata alam, seperti pantai dan daerah pegunungan. Herman Deru mengatakan pihaknya menuntut organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan pariwisata untuk kreatif dan inovatif dalam mencari daya tarik wisata lokal.

"Jangan juga kita paksa [wisata] Sumsel harus punya laut (seperti Lampung), makanya kita harus kreatif dan rasional menciptakan objek wisata sesuai potensi yang kita punya," paparnya.

Gubernur menjelaskan bahwa sebetulnya Sumsel juga memiliki

► Sumsel juga dapat mengembangkan wisata religi, karena memiliki objek wisata tematik seperti itu yang sangat potensial.

► Kadin Sumsel mendukung penuh rencana pembangunan jembatan penghubung menuju Babel.

potensi alam di sejumlah daerah, salah satunya Gunung Dempo di Kota Pagaralam. Hanya saja, akses menuju daerah tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan menuju provinsi tetangga.

Oleh karena itu, menurut dia, Sumsel dapat membuat sport tourism atau wisata olahraga. Sejumlah gelaran pun telah dilaksanakan oleh Pemprov Sumsel. Salah satunya Sriwijaya Ranau Gran Fondo yang merupakan agenda bersepeda dengan titik akhir di Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Selain itu, kata Herman, provinsi yang dipimpinnya juga dapat mengembangkan wisata religi, karena memiliki objek wisata tematik seperti itu yang sangat potensial seperti ziarah kubro yang sudah menjadi agenda tahunan Pemkot Palembang.

JEMBATAN LEMATANG

Dalam perkembangan lainnya, Pemerintah Kota Pagaralam mendesak pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan Jembatan Lematang untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di rute berkelok tersebut.

Walikota Pagaralam Alpien Maskoni



Bisnis/Nur Hafidat

mengatakan pembangunan Jembatan Lematang dinilai sangat mendesak agar tidak terjadi kembali kecelakaan serupa yang dialami Bus Sriwijaya rute Bengkulu–Palembang di kelokan Lematang beberapa hari lalu. Apalagi kecelakaan seperti itu sudah sering terjadi.

"Kami sudah usulkan agar pemerintah pusat membangun jembatan Lematang yang baru. Sebab memang lokasi tersebut sangat ekstrem," ujarnya, Kamis (26/12).

Menurut Alpien, sebetulnya pemerintah daerah sudah pernah mengusulkan pembangunan jembatan tersebut pada 2016 lalu. Bahkan perencanaan pun sudah dibuat, termasuk desain dan rencana konstruksi jembatan sudah dibahas tetapi sejauh ini belum juga direalisasikan.

"Kondisi jalan yang naik serta turunan dan tinggung yang sangat tajam. Ini yang membuat kami mengusulkan pembangunan jembatan tersebut. Namun tentunya ini perlu adanya bantuan dari pemerintah pusat," paparnya.

Menurut dia, perencanaan usulan proyek jembatan tersebut dibatalkan oleh pemerintah pusat dan hanya

dilakukan pelebaran jalan yang dilakukan pada 2017 dan 2018 lalu.

"Kejadian ini [kecelakaan Bus Sriwijaya] menjadi pintu masuk kami untuk melanjutkan kembali perencanaan pembuatan jembatan itu ke pemerintah pusat," jelasnya.

Lokasi jalan di titik kecelakaan bus Sriwijaya tersebut, kata Alpien, merupakan jalan yang dikelola oleh negara karena masuk sebagai jalan nasional.

Oleh karena itu, kepada pemerintah pusat sudah disampaikan usulan guna mengambil langkah dengan merealisasikan jembatan di sekitar lokasi.

"Kami akan kembali mengajukan proposal pengajuan untuk membangun jembatan ini segera agar kejadian seperti ini tak terulang," ujar Alpien.

Menyoal kebutuhan infrastruktur darat seperti jembatan, beberapa waktu lalu Kamar Dagang dan Industri Sumatera Selatan juga mendukung penuh rencana pembangunan sarana tersebut sebagai penghubung antara Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Ketua Kadin Sumsel Dodi Reza Alex mengatakan pembangunan jembatan

penghubung tersebut akan mendukung perekonomian di dua pulau.

"Kadin Sumsel sangat mendukung dan akan mendorong realisasi serta percepatan pembangunan jembatan penghubung dua pulau ini," katanya.

Dodi berharap apabila pembangunan jembatan tersebut selesai diharapkan tingkat perekonomian di dua daerah yakni Sumsel-Babel dapat meningkat.

"Ini proyek infrastruktur yang sangat strategis dan dipastikan akan memberikan kontribusi positif," paparnya.

Dari catatan yang ada, rencana pembangunan jembatan sepanjang 13 kilometer antara Sumsel-Babel tersebut akan dimulai dari Desa Tanjung Tapah, Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Selanjutnya, jembatan akan tembus ke Bangka Tengah. Adapun untuk studi kelayakan (feasibility study/FS) direncanakan pada tahun 2020 mendatang.

Sebelumnya, Wakil Bupati Ogan Komering Ilir M. Djakfar Shodik, mengatakan proyek infrastruktur tersebut bakal berdampak signifikan terhadap ekonomi antara kedua lokasi, baik di OKI maupun di Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Provinsi Babel. ■

Judul	Jateng Kebut Lahan Baru 5.700 Ha	Tanggal	Sabtu, 28 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 12)		
Resume	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memacu pengembangan tiga kawasan industri baru pada 2020 yang berlokasi di Brebes, Kebumen dan Rembang dengan total luasan 5.705,73 ha.		

► PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

Jateng Kebut Lahan Baru 5.700 Ha

Bisnis, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memacu pengembangan tiga kawasan industri (KI) baru pada 2020 yang berlokasi di Brebes, Kebumen, dan Rembang dengan total luasan 5.705,73 hektare (ha).

Berdasarkan paparan kinerja Pemprov Jateng 2019, ada tiga KI baru yang memasuki tahap Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan. Ketiga KI tersebut adalah KI Brebes dengan luasan 3.977 ha, KI Rembang seluas 1.054 ha, dan KI Kebumen seluas 674,73 ha.

"Pengembangan ketiga KI tersebut menjadi salah satu prioritas 2020. Proyek ini bekerja sama dengan pemerintah pusat dan swasta," tutur Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Jumat (27/12).

Berdasarkan arahan Kepala Negara,

KI Brebes merupakan proyek super prioritas di Jateng untuk memacu perekonomian, di samping Kawasan Candi Borobudur, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.

Pada penghujung tahun ini, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Brebes periode 2019—2039 sudah ditetapkan. Adanya regulasi tersebut diharapkan mendukung pengembangan KI Brebes.

Pengembangan 3 KI baru akan melengkapi 7 rencana proyek KI lainnya yang sedang dalam tahap perizinan dan *Detailed Engineering Design* (DED). Dari 7 proyek tersebut, 3 di antaranya berlokasi Demak, sedangkan selebihnya berada di Semarang, Kebumen, Boyolali, dan Grobogan.

Ganjar mengatakan pihaknya melakukan tur investasi kepada sejumlah pengusaha potensial yang ingin

mengembangkan bisnisnya di Jateng. Pemprov menawarkan sejumlah wilayah di kabupaten/kota yang dinilai potensial.

Menurutnya, percepatan investasi di pemerintah pusat harus dibantu realisasinya oleh pemerintah daerah. Permasalahan utama yang bisa ditangani Pemda adalah perizinan dan pertanahan.

"Oleh karena itu, Pemprov Jateng berkomitmen memudahkan regulasi dengan menerbitkan *omnibus law* di tingkat daerah. Dalam tanda kutip, penghambat kita adalah regulasi, maka perlu kita deregulasi untuk percepatan," ujarnya.

Sementara itu, pada 18 Desember 2019, pemerintah menetapkan Kendal sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2019. Dalam regulasi tersebut, KEK ditetapkan

Rencana Pengembangan Kawasan Industri di Jateng pada 2020

Kabupaten	Lokasi	Luasan (ha)
Brebes	Kec. Losari, Kec. Tanjung, Kec. Bulakamba	3.977
Kebumen	Kec. Pertanahan, Kec. Kilirong	674,73
Rembang	Kec. Lasem, Kec. Rembang, Kec. Pancur, Kec. Pamotan	1.054

Kawasan Industri yang sedang tahap pengurusan izin atau *Detailed Engineering Design*

Sumber: Pemprov Jateng
BISNIS/ADITYO DIO

1. PT Primamandiri Indonesia di Cilacap
2. PT Sentra Adi Karya di Kab. Semarang
3. Rencana Kawasan Industri Tekstil di Boyolali
4. PT Azam Laksana Intan Buana di Grobogan
5. PT Buana Cipta Megah di Demak
6. PT Mitra Bumi Dadi Mukti di Demak
7. PT Jasamas Graha Utama di Demak

kan seluas 1.000 ha, yang terdiri dari tiga zona, yakni pengolahan ekspor, logistik, dan industri.

Langkah selanjutnya yang ditempuh untuk pengembangan KEK adalah menetapkan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola. Sebelumnya, KI Kendal dikelola oleh PT Kendal

Industrial Park (KIP).

KIP merupakan perusahaan patungan antara PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIIA) dan pengembangan skala kota asal Singapura, Sembcorp Development Indonesia Ltd., dengan porsi kepemilikan saham masing-masing 51% dan 49%. (Hafiyyan)

Judul	Swasta Asing Diserukan Ikut Biayai Proyek Strategis	Tanggal	Sabtu, 28 Desember 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 12)		
Resume	Pemerintah terus mendorong keikutsertaan swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah menargetkan 42% pembiayaan infrastruktur didapat dari keikutsertaan swasta.		



Swasta Asing Diserukan Ikut Biayai Proyek Strategis

PEMERINTAH terus mendorong keikutsertaan swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah menargetkan 42% pembiayaan infrastruktur didapat dari keikutsertaan swasta.

"Kami punya perincian sumber pendanaan PSN. Dari 2016 sampai 2020 diperkirakan terjadi peningkatan pembiayaan hampir 10 kali lipat, dengan potensi pembiayaan swasta dari yang tadinya diperkirakan hanya Rp170 triliun di 2020 dan seterusnya mencapai Rp1.400 triliun," jelas Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Koordinator Perekonomian, Bastary Pandji Indra, di

Jakarta, kemarin.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menyerukan agar swasta yang mendanai proyek pemerintah ini jangan hanya dari lokal. Pasalnya, sumber pendanaan swasta lokal ialah perbankan lokal pula.

"Perbankan lokal selama ini sudah dipakai BUMN yang membangun selama empat tahun ini sehingga mungkin uangnya juga sudah mulai berkurang. Untuk itu, kami ingin mendorong KPBU dengan pemainnya dari luar supaya mereka membawa uang dari luar masuk ke sini," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Selain pendanaan dari swasta, pemerintah juga diharapkan terus

mengelaborasi skema-skema dalam pembiayaan infrastruktur.

Menurut Bastary, pemerintah juga tengah menyiapkan dan mempelajari skema *land value capture*, yakni mekanisme untuk mengambil sebagian kenaikan dari nilai tanah akibat investasi publik.

Sebagai informasi, sepanjang 2016 hingga 2019, pemerintah telah menyelesaikan 92 Proyek Strategis Nasional. Nilai investasi untuk proyek-proyek tersebut mencapai Rp467,4 triliun.

Proyek itu antara lain pembangunan tol sepanjang 964 kilometer, moda raya terpadu (MRT) dan lintas rel terpadu (LRT) pertama di Indonesia, lima bandara di lima provinsi, dan 15 bendungan. (Ifa/E-3)

Judul	Ibu Kota Belum Masuk PSN	Tanggal	Senin, 30 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Proyek IKN belum diusulkan menjadi PSN kendati Kementerian PUPR sudah merencanakan proses konstruksi pada tahun depan.		

► PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Ibu Kota Belum Masuk PSN

Bisnis, JAKARTA — Proyek Ibu Kota Negara (IKN) belum diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) kendati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah merencanakan proses konstruksi pada tahun depan.

Aprianus Dini T
redaksi@bisnis.com

Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan bahwa kendati pihaknya belum menerima usulan proyek-proyek pembangunan infrastruktur terkait dengan IKN untuk dijadikan PSN, sudah ada proyek PSN yang secara tidak langsung mendukung IKN.

"Kami belum melihat adanya usulan proyek-proyek dari IKN [menjadi PSN]. Namun sebagai contoh di Kalimantan, ada jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Ini sebenarnya mendorong atau mendukung IKN secara tidak langsung karena jaraknya dekat dengan lokasi," ujarnya pekan lalu.

Namun, Wahyu mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa proyek-proyek dalam IKN masuk sebagai PSN ke depannya.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga memastikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara akan masuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) tapi masih dalam proses pembahasan.

► KPPIP menyebut sejak Juni 2018 telah menerima usulan 82 proyek untuk dimasukkan dalam PSN yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan swasta.

"Sekarang sedang dalam proses pembahasan," ujarnya melalui pesan singkat kepada *Bisnis*, Minggu (29/12).

Danis juga menilai IKN akan masuk dalam kriteria Proyek Strategis Nasional, sehingga dia berharap infrastruktur utama yang menunjang bisa dimasukkan di sana.

Terkait usulan proyek untuk masuk dalam PSN, KPPIP mencatat bahwa sejak Juni 2018 telah menerima usulan 82 proyek untuk dimasukkan dalam PSN yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan swasta.

Menurutnya, sejumlah tantangan siap dihadapi KPPIP dalam mengawal penyediaan 52 Proyek Strategis Nasional pada tahun depan.

"Salah satu tantangan terbesar yang masih akan dihadapi adalah tumpang tindihnya regulasi. Kami pun di sini dalam *Omnibus Law* memberikan masukan sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut," ujarnya.

KPPIP, katanya, mengandalkan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) untuk memantau dan menemukan penyebaran proyek-proyek infrastruktur melalui pemetaan dengan tingkat akurasi tinggi.

Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan proyek infrastruktur, di mana PSN termasuk di dalamnya agar terintegrasi dengan proyek lainnya atau tidak tumpang tindih.

Secara umum, Pelaksanaan PKSP atau *One Map Policy* adalah mengkompilasi 85 peta tematik di 34

Tantangan Penyediaan Proyek Strategis Nasional

1. Tumpang tindihnya regulasi. *Omnibus Law* sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut.
2. Peningkatan kualitas dokumen penyiapan proyek. Penyiapan dokumen proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) harus berkualitas ke depannya.
3. Perluasan akses pembiayaan infrastruktur juga harus dilakukan agar ketergantungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dikurangi.
4. Peningkatan tingkat kemudahan berusaha jika ada swasta nasional atau asing yang berminat mendanai proyek infrastruktur.
5. Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
6. Pengintegrasian perencanaan pembangunan.

Sumber: KPPIP
Bisnis/Kominfo/Wahyut

provinsi dari 19 Kementerian/Lembaga.

AIR MINUM

Sementara itu, PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI), anak usaha PT Waskita Karya (Persero), membidik proyek penyediaan air minum di Kalimantan Timur. Perseroan menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing untuk menggarap proyek tersebut.

Direktur Utama WKI, Eko Widianto mengatakan sektor air minum menjadi salah satu bidang usaha infrastruktur yang sedang dirintis oleh perseroan. Dia menyebut, ekspansi ke sektor air minum dilakukan seiring rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

"Kami mau *ngejar* yang di IKN. Itu *kan* kapasitasnya bisa besar, kami mungkin tidak sendirian," ujarnya kepada *Bisnis*.

Eko menerangkan, pihaknya telah menyiapkan konsep yang ada di bawah tanah (*underground*) terkait dengan rencana ekspansi ke wilayah IKN. Namun, WKI masih menunggu kepastian desain

IKN yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dia menambahkan, pihaknya belum bisa memperkirakan kebutuhan investasi untuk menggarap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kalimantan Timur. Kendati demikian, nilai investasi diperkirakan lebih mahal dibandingkan dengan proyek SPAM biasa.

Pasalnya, IKN akan masuk zona air minum prima yang mana air yang diproduksi bisa langsung diminum. Eko mengungkapkan, pihaknya menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing dalam penggunaan teknologi air siap minum. "Kami sedang peninjakan dengan Singapura untuk bisa [menerapkan teknologi] langsung *drinking water*," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, desain IKN akan ditetapkan pada tahun depan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melansir, pemerintah juga membuka keran penanaman modal dari investor guna membiayai pembangunan IKN. (Rivki Maulana)

Judul	Konsep Kota Hijau Cerdas Belum Matang	Tanggal	Senin, 30 Desember 2019
Media	Kompas (Halaman, 10)		
Resume	Konsep kota hijau cerdas dalam pembangunan ibu kota belum disiapkan secara matang. Padahal, persiapan sejak dini dapat memitigasi dampak pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik.		

PEMINDAHAN IBU KOTA

Konsep Kota Hijau Cerdas Belum Matang

JAKARTA, KOMPAS — Konsep kota hijau cerdas dalam pembangunan ibu kota belum disiapkan secara matang. Padahal, persiapan sejak dini dapat memitigasi dampak pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, dengan kondisi saat ini, sulit mewujudkan pembangunan kota hijau cerdas di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Setelah mengunjungi kawasan itu beberapa hari lalu, menurut dia, banyak kendala di lapangan perlu diselesaikan. "Harus ada ketetapan rencana tata ruang daerah agar jelas mana daerah konservasi hutan beserta satwa liarnya, berapa luas lahan maksimal yang akan dibangun, dan lokasi persisnya," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (29/12/2019).

Sementara pemanfaatan empat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kalimantan dinilai juga bertentangan dengan konsep kota hijau cerdas. Meski nantinya transportasi yang dipakai adalah kendaraan listrik, itu tetap tidak berkelanjutan karena listrik yang digunakan dari pembakaran batubara.

Maraknya penggunaan mobil listrik di ibu kota di masa depan mesti diantisipasi dengan menata kota yang memusat dan terpadu. Jika itu tak dilakukan, ancaman kemacetan menghantui karena warga lebih suka mengendarai mobil pribadi.

"Pola kerja masyarakat lokal harus disesuaikan pengembangan kota hijau cerdas. Mereka akan mengalami banyak perubahan budaya," katanya. Kendati demikian, rencana pemerintah membangun ibu kota baru yang terbebas dari pabrik dan industri dinilai selaras dengan konsep kota hijau cerdas.

Langkah mitigasi terkait bencana lingkungan di Kalimantan Timur juga perlu disiapkan dengan baik, misalnya mengantisipasi krisis air bersih, mengatasi ancaman banjir, dan menghalau asap kebakaran.

Apalagi kondisi perbukitan menjadikan kawasan ibu kota baru rawan banjir dan longsor. Terlebih jika pembangunan ko-

Kondisi hutan berbukit-bukit dan (kondisi) geologis tanahnya harus dikaji secara mendalam. Begitu juga ancaman kebakaran hutan dan lahan.

ta dilakukan dengan cara membatasi hutan. Daerah penahan dan resapan air akan tergerus. "Kondisi hutan berbukit-bukit dan (kondisi) geologis tanahnya harus dikaji secara mendalam. Begitu juga ancaman kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Pertimbangan utama

Beberapa waktu lalu, pemenang sayembara desain ibu kota telah diumumkan. Tim dari Urban+ Associate Designer meraih gelar juara berkat desain yang mereka namakan "Nagara Rimba Nusa". Menurut rencana, wilayah inti ibu kota itu akan dibangun di atas lahan seluas 5.000-6.000 hektar.

Anggota tim Urban+ Associate Designer, Yugo Phurbjoyo, memaparkan, faktor lingkungan jadi pertimbangan utama penyusunan desain ibu kota. Penempatan istana negara, misalnya, menghindari lokasi bekas tambang dan hutan lindung, dan tak mengganggu kelestarian ekosistem. "Kami ini menampilkan identitas kebangsaan Indonesia, keindahan alam dan kota cerdas," katanya.

Kota cerdas yang akan diusung tidak lepas dari pemanfaatan lingkungan sekitar. Konsepnya, lingkungan menjadi sumber energi bagi ibu kota negara, termasuk kaitan dengan akses mobilitas penduduknya.

Sementara Wakil Ketua Sekretariat Tim Koordinasi Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan, pemerintah menyiapkan beberapa hal secara paralel. Selain studi kelayakan, pemerintah juga menyusun rencana induk, desain urban, dan undang-undang ibu kota. "Undang-undang tentang ibu kota akan jadi landasan utama langkah selanjutnya," katanya. (FRD)

Judul	Konsep Ibu Kota Baru Belum Matang	Tanggal	Senin, 30 Desember 2019
Media	Kompas (Halaman, Jendela)		
Resume	Konsep kota hijau cerdas dalam pembangunan ibu kota belum cukup matang. Mitigasi risiko kerusakan lingkungan akibat pembangkit listrik tenaga uap dari batubara sangat penting agar kota tetap ramah lingkungan.		

KONSEP IBU KOTA BARU BELUM MATANG



KOMPAS/SUCIPTO

Konsep kota hijau cerdas dalam pembangunan ibu kota belum cukup matang. Mitigasi risiko kerusakan lingkungan akibat pembangkit listrik tenaga uap dari batubara sangat penting agar kota tetap ramah lingkungan.

FAJAR RAMADHAN

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, dengan kondisi saat ini, rasanya sulit mewujudkan pembangunan kota hijau cerdas di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Seusai dirinya mengunjungi kawasan tersebut beberapa hari lalu, menurut dia, banyak kendala di lapangan yang perlu diselesaikan. "Harus ada ketetapan rencana tata ruang daerah supaya jelas, mana saja daerah konservasi hutan beserta satwanya, berapa luas lahan maksimal yang akan dibangun, dan di mana lokasi persisnya," ujar-

nya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (29/12/2019).

Sementara itu, ia juga menilai, pemanfaatan empat pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan bertentangan dengan konsep kota hijau cerdas. Meski nantinya transportasi yang digunakan adalah kendaraan listrik, tetap saja tidak berkelanjutan lantaran listrik yang digunakan berasal dari pembakaran batubara.

Perubahan budaya

Penggunaan mobil listrik di ibu kota baru, kata Nirwono, perlu diantisipasi dengan melakukan penataan kota yang memusat dan terpadu. Jika tidak, ancaman kemacetan tetap

akan menghantui karena masyarakat lebih suka mengendarai mobil pribadi.

"Pola kerja masyarakat lokal harus disesuaikan dengan pembangunan kota hijau cerdas. Mereka akan mengalami banyak perubahan budaya," katanya.

Rencana pemerintah membangun ibu kota baru yang terbebas dari pabrik dan industri dipandang Nirwono selaras dengan konsep kota hijau cerdas.

Nirwono berujar bahwa langkah-langkah mitigasi terkait bencana lingkungan di Kalimantan Timur perlu disiapkan dengan baik, misalnya dalam mengatasi kesulitan air bersih, mengatasi ancaman banjir, dan mengalau asap kebakaran. Menurut dia, kondisi berbukit menjadikan kawasan ibu kota baru rawan banjir dan longsor, terlebih jika pembangunannya dengan membabat hutan. Daerah penahan dan resapan air akan tergerus.

Beberapa waktu lalu, pemenang sayembara desain ibu kota telah diumumkan Kementerian Pekerjaan Umum

Pemandangan kawasan hutan industri PT ITCI Hutani Manunggal yang menjadi calon lokasi ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 18 Desember 2019.

dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tim arsitek Urban+ Associate Designer menjadi juara berkat desain Nagara Rimba Nusa. Menurut rencana, wilayah inti ibu kota akan dibangun di lahan 5.000-6.000 hektar.

Pertimbangan utama

Anggota tim Urban+ Associate Designer, Yugo Phurbajojo, mengatakan, faktor lingkungan menjadi sektor utama pertimbangan desain ibu kota. Penempatan istana negara, misalnya, menghindari lokasi bekas tambang atau hutan lindung.

Wakil Ketua Sekretariat Tim Koordinasi Strategis Pe-

mindahan Ibu Kota Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Hayu Parasati mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan beberapa hal secara paralel. Selain studi kelayakan (*feasibility study*), pemerintah juga menyusun rencana induk, desain urban, sekaligus menyiapkan undang-undang tentang ibu kota.

"Undang-undang tentang ibu kota ini yang akan menjadi landasan utama langkah-langkah selanjutnya," katanya.

Sejauh ini, tim pemindahan ibu kota membuat kajian tentang pemindahan ibu kota yang dilakukan negara lain. Dalam waktu 100 tahun terakhir, setidaknya ada 35 negara yang memindahkan ibu kota. Selain itu, sekitar 30 negara masih menjalani pemindahan ibu kota tersebut.

"Indonesia adalah satu-satunya negara yang akan memindahkan ibu kotanya sejauh 1.000 kilometer melintasi pulau-pulau," ujarnya.

SHARE

Judul	Swasta belum Minati KPBU Perumahan	Tanggal	Senin, 30 Desember 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 12)		
Resume	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengungkapkan, hingga saat ini belum ada swasta yang menyampaikan ketertarikannya untuk turut serta dalam program pembangunan perumahan dengan skema KPBU.		

Swasta belum Minati KPBU Perumahan

DIREKTUR Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Eko Djoeli Heripoerwanto mengungkapkan, hingga saat ini belum ada swasta yang menyampaikan ketertarikannya untuk turut serta dalam program pembangunan perumahan dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

"Sampai sekarang kami belum menemukan peminat dari swasta, baik developer atau investor, di sektor perumahan," ujar Heri.

Belum adanya tanda-tanda dari

pihak swasta untuk ikut terlibat, lanjutnya, tidak terlepas dari program tersebut yang masih dalam tahap pematangan.

Sedianya, program KPBU pada perumahan tidak berbeda dengan KPBU pada sektor-sektor lain seperti tol. Pemerintah akan turut membantu dalam hal penyiapan studi, bahkan hingga pembangunan sebagian fisik proyek.

Heri menyebut, saat ini sudah ada satu proyek KPBU perumahan yang tengah berjalan. Namun, itu diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bandung. "Tanahnya milik pemda setempat."

Untuk program KPBU perumahan, pemerintah telah menyiapkan empat proyek yang akan dijadikan pilot program. Keempat proyek tersebut terletak di Bandung, Bekasi, Palembang, dan Pontianak.

Di kesempatan yang sama, Heri juga menyampaikan pemerintah pada 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,67 triliun untuk subsidi KPR. Sebagian besar dana itu disalurkan melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp11 triliun untuk membiayai pembangunan 102 ribu hunian.

Sisa anggarannya disebar ke skema subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp600 miliar untuk 150 ribu unit rumah dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) sebesar Rp13,4 miliar. (Pra/E-2)